



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **A. Konteks Penelitian**

Sistem pendidikan di Indonesia terbagi menjadi beberapa jalur dan jenjang. Dalam sistem pendidikan di Indonesia dikenal adanya satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal. Pada jalur pendidikan formal, dikenal adanya lembaga pendidikan sekolah/madrasah. Pada jalur nonformal, dikenal adanya bentuk pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah diniyah, pendidikan kesetaraan dalam bentuk pendidikan paket A, paket B, dan paket C, Pada jalur formal dikenal adanya lembaga dalam bentuk pendidikan keluarga.

Dari jenjang pendidikan dalam sistem pendidikan di Indonesia dikenal adanya jenjang pendidikan prasekolah (Taman Kanak-kanan/Raudlatul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyaul Athfal), jenjang pendidikan dasar (Sekolah Dasar/Mdrasah Ibdaiyah/Pendidikan Kesetaraan/Paket A), jenjang pendidikan menengah (Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsnawiyah/Pendidikan Kesetaraan Paket B/Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aiyah/Pendidikan Kesetaraan/Paket C), dan jenjang pendidikan tinggi.

Segenap satuan pendidikan dituntut untuk senantiasa melakukan perbaikan dalam segala aspek. Segenap satuan pendidikan dituntut untuk senantiasa menyesuaikan diri dengan situasi dan tuntutan perkembangan zaman, termasuk melaksanakan strategi peningkatan mutu.

Dalam konteks sistem pendidikan Islam, satuan pendidikan madrasah sebagai satuan pendidikan berciri khas Islam, mutlak melaksanakan kegiatan kependidikan dengan prinsip Islam. Landasan kegiatan kependidikan dalam sistem pendidikan Islam adalah kitab suci Al-Qur'an dan hadits. Hal ini sejalan dengan landasan prinsip dasar agama Islam pada umumnya. Landasan dasar dalam bentuk Al-Qur'an dan hadits tersebut dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk



penyamaan suatu kasus yang tidak ada *nash* hukumnya dengan kasus lain yang ada *nash*-nya sesuai kaidah hukum Islam. Landasan lain dalam bentuk kesepakatan para ahli ilmu pendidikan Islam yang diakui, termasuk dalam bentuk upaya pemikiran mendasar dan mendalam berdasarkan pemahaman penafsiran yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan aspek keilmuan yang terwujud dalam bentuk hasil pemikiran yang bersifat menyeluruh dan terpadu tentang tanda-tanda kekuasaan Allah berupa alam, manusia, masyarakat, bangsa, pengetahuan kemanusiaan, dan akhlaq.

Digunakannya Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai landasan berpikir dan landasan pengembangan sistem pendidikan dalam Islam merupakan sebuah keniscayaan atas dasar keyakinan akidah Islam, yang diyakini senantiasa sesuai dengan landasan rasional dan perkembangan jaman. Terbukti dalam perkembangan sejarah, peradaban Islam pernah mencapai puncak kejayaan di saat nilai-nilai Islam dilaksanakan secara komprehensif di seluruh sendi kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan.

Penerapan prinsip-prinsip Islam dalam konteks pendidikan pada satuan pendidikan berciri khas Islam selayaknya dilaksanakan secara komprehensif dalam segala aspek. Hal tersebut di mulai dari aspek yang tampak secara formal dalam aturan dan regulasi lembaga, maupun yang tidak muncul dalam aturan dan regulasi secara formal kelembagaan. Penerapan prinsip karakter keislaman yang tampak dalam aturan dan regulasi formal antara lain terwujud dalam tata tertib sekolah, materi pendidikan, metode pendidikan, penetapan seragam, sampai dengan perilaku sehari-hari. Sementara penerapan hal-hal yang tidak nampak dalam aturan dan regulasi formal antara lain dapat dilihat pada pemberlakuan norma, aturan, dan kebiasaan tertentu yang tidak tertulis di lembaga pendidikan tersebut. Madrasah yang berhaluan *ahlussunnah wal jama'ah* misalnya akan menerapkan tata cara salat Shubuh dengan menggunakan doa qunut, melaksanakan pembacaan tahlil dan surat Yaasin, melaksanakan istigasah, mengharuskan mengenakan kopiah, tidak canggung mengenakan sarung, bersalaman dengan mencium tangan, dan berbagai aktivitas lain yang tidak muncul secara formal dalam aturan satuan pendidikan, dan yang mungkin tidak diterapkan di lembaga pendidikan dengan karakter berbeda.

Penerapan perilaku dan kebiasaan mulia tersebut merupakan implementasi pengamalan ajaran Islam yang diyakini kebenarannya berdasarkan pemikiran para *mujtahid* sebelumnya. Keyakinan akan



kebenaran nilai kitab suci Al-Qur'an dan hadits Rasulullah sebagai landasan sistem pendidikan dalam Islam terbukti kebenarannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat AlBaqarah ayat 2 sebagai berikut.

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

*"Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang takwa", (Q.S. Al-Baqarah: 2) <sup>1</sup>*

Berdasarkan sudut pandang yang lain, Rhenald Kasali mengungkap istilah *Disruption Era* yang semula dipahami dalam dunia industri dan bisnis, tetapi juga merambah pada aspek kehidupan lainnya. Era disrupsi ditandai dengan munculnya demonetisasi, dematerialisasi, dan demokratisasi. Demonetisasi dipahami sebagai pencampakan karya atau peranan uang yang juga dikenal dengan *Society of Free*. Artinya masyarakat yang memperoleh secara gratis, tetapi sekaligus menunjukkan melalui model bisnis mereka bahwa yang menggratiskan itu ternyata menjadi perusahaan yang paling menguntungkan. Dematerialisasi berarti pemusnahan barang atau jasa, dari yang lama ke yang baru, misalnya dari rol film ke kamera digital. Sementara demokratisasi dipahami sebagai keadaan saat semua hal menjadi mudah dan murah. Semua harga turun dan membuat banyak hal semakin banyak tersedia dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan semua orang. <sup>2</sup>

Sejalan dengan pendapat Rhenald Kasali tersebut, peneliti Gerakan Sekolah Menyenangkan, Muhammad Nur Rizal, yang juga merupakan Ketua Grup Riset Digital Literasi DTETI UGM, menegaskan bahwa pada saat ini kehidupan di dunia tengah menghadapi sebuah gejala kehidupan yang ditandai dengan adanya perubahan pola tatanan kehidupan lama menuju pola tatanan kehidupan baru yang merasuk ke segenap sisi kehidupan. Fenomena ini dikenal dengan fenomena disrupsi yang dimaknai bahwa pergerakan dunia industri serta persaingan kerja tidak lagi selalu bersifat linear seperti gejala sebelumnya. Disrupsi dalam hal ini mampu melahirkan model kegiatan yang berbeda dibanding era sebelumnya. Hal ini ditandai dengan cara pencapaian tujuan dan hasil

<sup>1</sup> Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. (Jakarta : 2012). 2

<sup>2</sup> Rhenald Kasali, *Disruption : Tak Ada yang Tak Bisa Diubah sebelum Dihadapi Motivasi saja tidak Cukup* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 165-166.



yang lebih kreatif dan inovatif serta mampu membuat perubahan yang jauh berbeda dengan era sebelumnya yang dikenal dengan perubahan yang bersifat disruptif.<sup>3</sup>

Era perubahan yang begitu mendasar pada saat ini, lebih dikenal dengan era disrupsi, ini telah mampu menciptakan pola kehidupan dan kegiatan baru dengan tata cara pencapaian tujuan yang berbeda dibanding era sebelumnya menuju tata cara yang lebih inovatif. Kondisi seperti ini telah menggejala pada semua sisi kehidupan. Kecenderungan ini pada perkembangannya juga merambah dunia pendidikan. Dalam hal ini, disrupsi akan menginspirasi terjadinya berbagai macam inovasi dalam dunia pendidikan antara lain melalui digitalisasi sistem pendidikan. Hal ini sudah terjadi dengan munculnya berbagai macam inovasi aplikasi teknologi seperti MOOC (*Massive Open Online Course*) serta AI (*Artificial Intelligence*) yang merupakan inovasi strategi belajar yang dilaksanakan secara daring yang dirancang dengan menggunakan prinsip terbuka.

Sistem MOOC memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan pembelajaran dapat saling berbagi dan saling terhubung tanpa harus bertemu secara fisik. Mereka bisa melakukannya melalui sistem jaringan tertentu melalui media *online*. Kondisi ini menegaskan telah berlakunya prinsip yang lebih demokratis dalam bidang pendidikan dan bukti bahwa pengetahuan semakin terbuka. Hal ini akan menciptakan kesempatan bagi semua pelaku pendidikan untuk memanfaatkan aspek kemajuan teknologi dengan produktif dan semakin kreatif. Di sisi lain, *Artificial Intelligence* (AI) merupakan perangkat menggunakan teknologi canggih yang diibaratkan sebagai mesin kecerdasan buatan yang dibuat dan dikembangkan untuk melakukan pengembangan aktivitas tertentu untuk membantu meringankan kegiatan sehari-hari.

Dalam konteks aktivitas pendidikan, AI lebih banyak membantu subjek belajar melaksanakan aktivitas belajar individual sesuai kebutuhan dan kemampuan subjek belajar. Hal ini disebabkan AI memiliki kemampuan untuk melakukan pencarian terkait berbagai macam informasi pendidikan yang dibutuhkan pembelajar sekaligus menyajikan informasi tersebut dengan efektif dan efisien dengan dukungan sistem yang bisa dikembangkan secara interaktif. Sistem pembelajaran seperti ini dipastikan membuat banyak perubahan dalam

---

<sup>3</sup> Muhammad Nur Rizal, *Menghadapi Era Disrupsi*, Republica.co.id. diunduh pada tanggal 14 Desember 2018



hal metode pendidikan lama. Konsekuensi dari keadaan tersebut, tidak menutup kemungkinan akan mengubah kegiatan belajar mengajar secara total. Sekat-sekat ruang belajar dalam bentuk ruang kelas akan mengalami perubahan drastis dengan menggunakan pola pembelajaran berbasis teknologi digital dengan pemanfaatan aspek teknologi infomatika yang mampu menciptakan situasi belajar baru dengan memberikan pengalaman belajar yang lebih terbuka, memunculkan hal-hal baru, mampu melibatkan segenap kompoen belajar secara lebih aktif, memunculkan model belajar yang bervariasi, dan mengembangkan potensi belajar secara utuh.<sup>4</sup>

Kondisi sebagaimana diuraikan di atas saat ini tampak pada menggejalanya *home schooling* di beberapa kota besar serta munculnya lembaga bimbingan belajar daring dengan peserta yang mencapai ribuan.

Kegiatan bimbingan belajar dengan sistem dan strategi baru saat ini lebih menekankan pada materi belajar yang sesuai dengan kebutuhan setiap individu murid; bisa dilaksanakan proses belajar kapan saja; proses belajar bisa diulang-ulang kapan saja; proses belajar bisa dilakukan dimana saja; sehingga proses belajar serasa privat satu guru satu murid, proses belajar bisa dikatakan bebas dari gangguan; proses belajar dapat diulang dengan materi yang dapat diunduh sesuai dengan kebutuhan belajar siswa; kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara audio visual dengan memanfaatkan video belajar secara animasi yang disampaikan oleh guru terbaik yang dikenal dengan *Master Teacher*; materi belajar tersedia dengan berbagai macam jenis dalam bentuk ratusan ribu soal yang dapat diperoleh melalui perangkat *gadget* sehingga proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta mampu menerapkan kegiatan yang *paperless*.<sup>5</sup> Prinsip belajar tersebut benar-benar telah membuat perubahan besar pada sistem belajar peserta didik karena interaksi belajar antara guru dan siswa tidak lagi harus dilaksanakan di ruang belajar tertentu dengan jadwal belajar tertentu. Hal ini menjadi peringatan besar bagi sistem belajar konvensional yang saat ini digunakan di lembaga pendidikan konvensional pada semua jalur dan pada semua jenjang pendidikan; untuk senantiasa terbuka dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>4</sup> Muhammad Nur Rizal, *Menghadapi Era Disrupsi*. Republica.co.id. diunduh pada tanggal 14 Desember 2018

<sup>5</sup> <http://ruangguru.com/>



Kondisi di atas tentu akan berpengaruh besar terhadap keberadaan guru. Proses pendidikan tidak sekadar *transfer of learning*, guru tetap memiliki peran penting dalam melakukan *transfer of value*, melaksanakan penyajian informasi belajar serta memberikan layanan bimbingan kepada siswa dalam kegiatan belajar yang menggunakan praktik diskusi secara daring. Fungsi utama guru dalam era digital ini lebih ditekankan pada penanaman dan pembiasaan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik, sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan. Nilai-nilai mulia tersebut tentu tidak dapat ditanamkan dan dibiasakan mekanis apalagi oleh mesin. Sejalan dengan hal tersebut, guru mutlak. Harus segera mulai mengubah cara mereka mengajar dan mendidik dengan meninggalkan cara-cara lama yang antara lain ditandai dengan komunikasi satu arah, tidak kontekstual, terlalu verbalistis, dan hal-hal lain yang kurang sesuai diterapkan di era digital.

Guru harus belajar lebih cepat bersikap lebih terbuka menerima perubahan dan lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri terhadap hal-hal baru. Teknologi digital dapat dimanfaatkan guru untuk membantu agar bisa menciptakan situasi belajar yang lebih kondusif sehingga memungkinkan siswa bisa belajar lebih cepat dan efektif untuk berubah dan berkembang lebih baik. Fenomena ini bukan hanya terkait persoalan mengganti kelas tatap muka guru dan murid secara konvensional menjadi pembelajaran berbasis teknologi digital. Guru diharapkan mampu melakukan revolusi perubahan peran dari guru konvensional menjadi guru yang mampu menjadi sumber belajar atau pemberi pengetahuan bagi siswa; sekaligus mampu membimbing, mengasuh, menyediakan kebutuhan belajar, memberi motivasi dan inspirasi, mampu mengembangkan pola pikir dan perilaku yang kreatif dan inovatif, berwawasan ke depan, dengan landasan berpikir mengedepankan kerja sama dan pola berpikir sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan yang dibutuhkan siswa untuk menjalani kehidupan pada masa depan.

Tantangan besar di era industri 4.0 dan antaranya adalah dalam bentuk potensi dan bonus demografi yang besar di satu sisi. Namun di sisi lain, terdapat potensi angka pengangguran yang sangat besar dan berdampak besar dalam pola kehidupan masyarakat. Oleh karena itulah, pemerintah harus segera melaksanakan langkah strategis termasuk terkait revitalisasi sistem pembelajaran yang antara lain menyangkut : (1) materi dan proses pendidikan yang berorientasi pada penerapan pendidikan dan pembiasaan karakter yang unggul, (2) materi



pendidikan dan pemenuhan infrastruktur terkait pembelajaran yang memanfaatkan secara optimal kemajuan teknologi informatika baik dari sisi materi maupun media dan sumber belajarnya, (3) kewirausahaan terkait dengan tantangan besarnya potensi pengangguran dan potensi sumber daya manusia, (4) penyelarasan dunia pendidikan dengan dunia usaha, dan (5) evaluasi untuk menemukan probematika pendidikan dan mencari solusinya.<sup>6</sup>

Upaya pengembangan mutu dalam aspek pendidikan, khususnya pendidikan di madrasah mutlak dilaksanakan dan merupakan sebuah keniscayaan. Hal tersebut antara lain dilaksanakan dengan mengembangkan potensi siswa secara lebih komprehensif. David Krathwohl, yang telah merevisi pendapat Bloom terkait kecerdasan kognitif, menegaskan adanya ranah metakognisi. Ranah metakognisi ini dalam beberapa kasus ditengarai belum dikembangkan secara optimal dalam sistem dan proses pembelajaran saat ini, baik dalam kaitan perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian kegiatan pembelajaran saat ini. Oleh karena itulah untuk mengembangkan proses pembelajaran yang komprehensif dalam upaya mengoptimalkan potensi siswa, maka ranah tersebut harus dikembangkan secara komprehensif dalam proses pembelajaran. Ranah metakognisi yang dimaksudkan tersebut meliputi enam tingkat kecerdasan akademis, yakni kemampuan untuk mengingat, kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk menerapkan, kemampuan untuk menganalisis, kemampuan untuk mengevaluasi, dan kemampuan untuk mencipta (*creating*). Proses pembelajaran yang dilakukan untuk mengoptimalkan kecerdasan metakognisi bagi para siswa tersebut mempersyaratkan sistem dan situasi belajar yang kondusif, sehingga mampu mengoptimalkan potensi siswa dalam upaya mengenali kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks potensi pribadi serta mampu mengelola kelebihan dan kekurangannya tersebut dalam konteks pengembangan potensi belajar secara optimal.

Sejalan dengan hal tersebut, perlu ada perubahan paradigma pembelajaran bagi para guru khususnya sehingga mereka mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dinamis sistem pendidikan saat ini. Dalam hal ini, Guru dituntut untuk memiliki kemampuan melaksanakan bimbingan belajar kepada siswa agar mereka mampu mengoptimalkan bakat dan potensi belajarnya. Sejalan dengan hal tersebut guru dituntut memiliki sistem perencanaan pembelajaran

---

<sup>6</sup> Imron Arifin, dkk. *Kepemimpinan Pendidikan Memasuki Era Revolusi Industri 4.0*. (Malang : Penerbit UNM, 2019), 121



yang sistematis, berkelanjutan, dan aktual agar mampu menjaga mutu dan profesionalitasnya sesuai dengan tuntutan pendidikan untuk saat ini dan masa depan.

Penilaian kinerja pada guru tidak hanya terbatas pada uji kompetensi yang bersifat teoretis dan administratif semata, yang terwujud dalam bentuk dokumen perangkat pembelajaran, lembar dan hasil penilaian, serta aspek administratif lainnya; melainkan lebih ditekankan pada sisi kemampuan guru untuk membangkitkan semangat belajar dengan menghadirkan sistem pendidikan yang lebih humanistik dan mampu membuat siswa lebih bergairah dalam belajar serta lebih bersemangat untuk berperan aktif dan mampu memenangkan pertarungan di era modern ini.<sup>7</sup>

Secara teknis, sesuai dengan regulasi yang berlaku; indikator lembaga pendidikan berprestasi ditentukan melalui tingkat pencapaian kualitas pemenuhan standar nasional pendidikan. Untuk jenjang pendidikan menengah, standar ini mencakup delapan standar yang meliputi Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (SI), Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Satuan pendidikan yang menerapkan prinsip manajemen yang bermutu antara lain ditandai dengan keberhasilan pencapaian berbagai macam prestasi. Dengan demikian, pengertian mutu secara umum dipahami sebagai suatu kesesuaian antara idealisme dengan realitas. Dalam konteks pendidikan, hal ini muncul dalam bentuk standar yang bersifat dinamis yang tidak menutup kemungkinan akan adanya perubahan sesuai dengan tuntutan standar pembelajaran secara nasional serta perubahan lingkungan dan tingkat kepuasan masyarakat<sup>8</sup>.

Upaya peningkatan mutu merupakan upaya yang harus dilakukan secara terprogram, sistematis, dan berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu satuan pendidikan sebagai sebuah aktivitas yang terencana dan tersistem untuk meningkatkan mutu pendidikan pada sebuah satuan lembaga pendidikan, bisa dimulai dari sistem perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan. Mutu secara umum juga dapat dipahami sebagai ukuran untuk menetapkan baik atau buruknya suatu benda, kadar, taraf, atau derajat yang menyangkut kepandaian, kecerdasan, dan

---

<sup>7</sup> Rizal, *Era Disrupsi*. Republica.co.id.

<sup>8</sup> Agus Zaenul Fitri, *Manajemen Mutu dan Organisasi Perguruan Tinggi* (Tulungagung : STAIN Tulungagung Press, 2013), 82.



sebagainya.<sup>9</sup> Berkaitan dengan satuan pendidikan, maka mutu dapat dilihat dari keberhasilan satuan pendidikan tersebut untuk mencapai berbagai macam prestasi sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang secara konkret dapat dilihat dari tingginya minat masyarakat untuk mempercayakan proses pendidikan bagi putra putrinya dan menyekolahkan putra putrinya di satuan pendidikan tersebut.

Sementara itu secara umum, satuan pendidikan berprestasi dipahami sebagai lembaga pendidikan pada jenjang dan jalur pendidikan tertentu yang dinilai dari standar formal dan masyarakat memiliki mutu yang baik dilihat dari ukuran dan taraf kebaikan tertentu, baik dari sisi perencanaan, penyelenggaraan, maupun hasil. Standar formal antara lain ditandai dengan pencapaian akreditasi tertinggi (akreditasi A). Sementara dari unsur masyarakat, indikator prestasi antara lain ditandai dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi sehingga orang tua antusias menyekolahkan putra putrinya di lembaga pendidikan tersebut.

Fakta saat ini menunjukkan bahwa kondisi pendidikan di satuan pendidikan madrasah sebagai salah satu bentuk satuan pendidikan umum dengan ciri khas Islam di Indonesia senantiasa membuka peluang untuk ditingkatkan kualitasnya. Pendidikan Islam harus memiliki prinsip (1) tidak semata menekankan pengisian otak, tetapi harus mengoptimalkan upaya untuk melaksanakan proses pendidikan dalam upaya mengisi jiwa, membina perilaku dan akhlak mulia, serta meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan ibadah, (2) harus berorientasi pada mengembangkan kreativitas, inovasi, produktivitas, dan kemandirian sehingga mampu menciptakan generasi yang tidak mudah terhegemoni, (3) mengembangkan visi untuk mengembangkan pemahaman bahwa ilmu pengetahuan yang selama ini dipahami secara terpisah haruslah dipahami secara integral ke dalam ikatan tauhid, dan (4) harus mampu menyaring paham yang tidak sesuai dengan Islam serta senantiasa mampu memberikan pengarahan terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan agar senantiasa sesuai dengan kaidah Islam.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud. *Kanus Besar Bahasa Indonesia Versi V*

<sup>10</sup> Ainul Yaqin, *Menolak Liberalisme Islam : Klarifikasi serta Catatan atas Berbagai Wacana dan Isu Kontemporer* (Surabaya : MUI Provinsi Jawa Timur, 2015), 318.



Salah satu aspek yang sangat menentukan baik buruknya kualitas pendidikan adalah kurikulum. Bahkan ada anggapan bahwa kurikulum merupakan faktor penentu keberhasilan sebuah proses pendidikan, termasuk dalam konteks pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, khususnya Islam. Oleh karena itu, perhatian para pemerhati dan praktisi pendidikan seperti guru, dosen, dan pimpinan satuan pendidikan, terfokus pada aspek kurikulum. Prinsip seperti ini tidak selamanya benar karena kurikulum bukan merupakan faktor penentu utama keberhasilan pendidikan.

Berkaitan dengan sistem pendidikan di Indonesia, permasalahan utama yang harus diselesaikan sesungguhnya bukan permasalahan terkait kurikulum meskipun harus diakui bahwa bukan berarti kurikulum pendidikan di Indonesia tidak menimbulkan problem. Namun permasalahan utama yang harus diselesaikan secara sistematis dan terpadu dalam hal ini justru berkaitan dengan aspek lemahnya komitmen untuk meraih prestasi yang lebih baik, meningkatkan daya saing, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan semangat untuk menghilangkan kebodohan, serta meningkatkan kesadaran untuk berupaya dan berbuat yang terbaik.<sup>11</sup>

Kondisi sebagaimana diuraikan di atas secara teoretis menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap satuan pendidikan tertentu sehingga berpeluang melahirkan satuan pendidikan yang kurang berprestasi, lama kelamaan membuka kemungkinan tidak mendapatkan murid, tidak beroperasi, dan akhirnya ditutup izin operasionalnya. Sejalan dengan hal tersebut, muncul kebijakan *regrouping* pada beberapa lembaga satuan pendidikan yang kondisinya tidak memungkinkan bertahan. Namun di sisi lain muncul pula beberapa lembaga pendidikan baru yang mendapat kepercayaan masyarakat karena dengan berbagai macam inovasi dan kreativitas yang diterapkan. Lembaga pendidikan yang baru tersebut menunjukkan perbedaan dari lembaga pendidikan yang sudah ada serta memiliki karakter khas dan menjanjikan harapan baru terkait perbaikan mutu pendidikan.

Pembahasan terkait indikator mutu merujuk pada delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

---

<sup>11</sup> Mujamil Qomar, *Strategi Pendidikan Islam* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2013), 7.



Pendidikan (SNP) khususnya pada pasal 91 mengamanatkan bahwa upaya penjaminan mutu pendidikan wajib dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan pada setiap jenjang dan jalur pendidikan, baik pada jenjang prasekolah, pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi, pada jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan nonformal. Peraturan tersebut telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015.<sup>12</sup>

Penjaminan mutu dalam bidang pendidikan dilaksanakan agar satuan pendidikan mampu memenuhi, bahkan kalau memungkinkan bisa melampaui standar pendidikan sebagaimana dirumuskan dalam standar nasional pendidikan. Sebagai acuan teknis pelaksanaannya, pemerintah sebelumnya sudah mengeluarkan regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Kendati telah ditetapkan sejumlah aturan operasional tentang hal di atas, tetapi pada kenyataannya pada tataran implementasi masih banyak ditemukan permasalahan khususnya pada lembaga pendidikan yang berada pada jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah.<sup>13</sup>

Proses penjaminan mutu difokuskan antara lain pada hal yang dilaksanakan lembaga dalam rangka mengupayakan pemenuhan Standar proses pembelajaran. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa proses pembelajaran mencakup penyusunan program proses pembelajaran dalam bentuk perangkat pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dalam bentuk kegiatan belajar mengajar, penilaian proses pembelajaran dalam bentuk tes tulis, praktik, unjuk karya atau bentuk penilaian lainnya, pengawasan proses pembelajaran dalam bentuk supervisi kepala sekolah dan pengawas, serta tindak lanjut dalam bentuk kegiatan refleksi untuk memperbaiki sistem dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.

Perencanaan proses pembelajaran antara lain terkait dengan kesiapan guru untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran di kelas. Pelaksanaan proses antara lain berkaitan dengan implementasi program

---

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang *Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan*, diunduh pada tanggal 7 Januari 2019

<sup>13</sup> Adimin Diens, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah di Gorontalo*. Disertasi (Jakarta : UN), 2013)



ke dalam kegiatan pembelajaran. Pengawasan antara lain terkait dengan aspek pengawasan dan supervisi pada umumnya baik oleh kepala sekolah/madrasah maupun oleh pengawas pendidikan sesuai jenjang dan materi pelajarannya.<sup>14</sup>

Perlunya perubahan paradigma dalam bidang pendidikan sebagaimana diuraikan tersebut sesuai dengan pernyataan Nata yang menyatakan bahwa manajemen pendidikan harus dikelola dengan menerapkan prinsip dasar pendekatan manajemen bisnis yang bertumpu pada upaya maksimal pihak manajemen untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan (*customer oriented*). Prinsip ini sesuai dengan konsep *total quality management* (Manajemen Mutu Terpadu). Manajemen mutu ini terkait dengan semua aspek pendidikan, mulai dari visi dan misi sampai dengan kemampuan satuan pendidikan menyediakan investasi yang memadai di bidang pengelolaan pendidikan.<sup>15</sup>

Penelitian ini diberi judul "*Strategi Peningkatan Mutu pada Satuan Pendidikan Berprestasi Ditinjau dari Kurikulum dan Guru: Studi Multikasus pada Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar dan Madrasah Aliyah "Ma'arif" Nahdlatul Ulama Kota Blitar*". Konteks penelitian ini menyangkut madrasah yang memiliki prestasi dengan berbagai indikator yang telah ditetapkan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang biasa dikenal dengan madrasah negeri, maupun yang diselenggarakan masyarakat yang biasa dikenal dengan madrasah swasta. Indikator yang bisa digunakan dalam hal ini bisa berupa status akreditasi, pencapaian prestasi akademik, maupun pencapaian prestasi nonakademik yang bisa menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut.

Satuan pendidikan MAN Kota Blitar dan satuan pendidikan MA "Ma'arif" NU Kota Blitar dipilih sebagai subjek penelitian karena dinilai memenuhi kriteria sebagai satuan pendidikan berprestasi. MAN Kota Blitar merupakan satu-satunya madrasah aliyah yang diselenggarakan pemerintah di Kota Blitar. Lembaga ini memiliki status akreditasi A. Berbagai macam prestasi telah berhasil diraih satuan pendidikan ini. Hal tersebut menjadikan satuan pendidikan yang sebelumnya merupakan lembaga Pendidikan Guru Agama (PGA) 6 Tahun, berubah menjadi

---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 tentang *Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah*, 2.

<sup>15</sup> Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2009), 24



Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri (SP IAIN) dan akhirnya menjadi madrasah aliyah Negeri (MAN) ini telah menunjukkan kontribusi melahirkan alumni yang sukses dalam kehidupannya sehingga mampu menjadikan lembaga ini untuk mendapatkan kepercayaan besar dari masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya jumlah siswa saat ini. Kondisi ini diimbangi dengan berbagai macam upaya satuan pendidikan untuk melakukan inovasi, termasuk dengan melaksanakan program *life skill* serta mengembangkan kegiatan *ma'had*.

Dari telaah dokumen, dapat diketahui bahwa MAN Kota Blitar memiliki ciri khas sebagai satuan pendidikan berciri khas Islam pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah atas yang menyelenggarakan pendidikan vokasi.<sup>16</sup> Kegiatan vokasi yang dilaksanakan antara lain berkaitan dengan kegiatan tata boga, tata busana, dan teknologi informatika. Hal ini diperkuat dengan ketersediaan berbagai perangkat untuk mendukung kegiatan vokasi tersebut, diantaranya berupa perangkat memasak, jahit-menjahit, sampai dengan laboratorium komputer.<sup>17</sup> Wawancara dengan Kepala dan Wakil Kepala MAN Kota Blitar juga menegaskan keberadaan satuan pendidikan ini sebagai satuan pendidikan yang berpotensi besar dan merupakan satuan pendidikan berprestasi dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Berbagai inovasi manajemen, pencapaian prestasi, dan alumninya yang mampu pendidikan ke berbagai pendidikan tinggi dan mampu berkontribusi besar di masyarakat, menjadikan lembaga pendidikan ini mendapatkan kepercayaan besar dari masyarakat.

Hal tersebut merupakan sebagian indikator bahwa MAN Kota Blitar ini merupakan satuan pendidikan berprestasi.<sup>18</sup>

Pada sisi lain, MA "Ma'arif" NU sebagai salah satu lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat juga menunjukkan berbagai macam prestasi antara lain dengan keberhasilan memperoleh status akreditasi A. Berbagai macam prestasi dari siswa, guru, maupun lembaga baik dalam bidang akademik maupun nonakademik berhasil diraih satuan pendidikan ini.<sup>19</sup> Hal tersebut menjadikan satuan pendidikan yang merupakan aset bersama antara Pengurus Cabang

---

<sup>16</sup> D.KTSP.MAN2018/10/18/13.00-15.00

<sup>17</sup> O.W. MAN.24/10/18/13.00-14.00

<sup>18</sup> W.S.KMAN.1.25/10/18.09.00-11.00

<sup>19</sup> FGD2 .MAMNU.1/4/19.09.00-12.00



Nahdlatul Ulama (PC NU) Kabupaten dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kota Blitar ini semakin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Hal ini bisa dibuktikan dari semakin besarnya jumlah siswa dengan berbagai macam pencapaian prestasinya. MA "Ma'arif" NU memiliki karakter khas sebagai satuan pendidikan yang sejak awal pendiriannya mengembangkan sistem *full board* dengan mengembangkan lembaga Pondok Pesantren "Nurul Ulum" serta madrasah diniyah jenjang *ula* dan *wustha*. Dari sini tentu akan banyak karakter khas yang bisa digali terkait inovasi kurikulum dan manajemen pada umumnya.<sup>20</sup>

Ketersediaan fasilitas belajar di MAM NU juga menunjukkan bahwa satuan pendidikan ini layak mendapatkan predikat sebagai madrasah berprestasi. Kondisi fasilitasnya pun terus dikembangkan, yaitu sudah tersedia fasilitas yang cukup layak untuk mengembangkan situasi belajar. Diantaranya ketersediaan ruang kelas, pemondokan santri, laboratorium, perpustakaan, perangkat pengembangan diri, serta berbagai fasilitas lainnya.<sup>21</sup>

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji strategi yang dilaksanakan satuan pendidikan untuk mencapai lembaga pendidikan yang berprestasi, mempertahankan prestasi, dan mengembangkan prestasi yang telah dicapai tersebut sehingga mencapai prestasi lain yang lebih baik.

Dalam hal ini upaya yang dilakukan bisa ditinjau dari dua aspek, baik dari sisi internal maupun sisi eksternal lembaga. Secara internal, penelitian ini diarahkan pada serangkaian program, yaitu pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan tindak lanjut yang mencakup aspek kurikulum, ketenagaan, sarana prasarana, pembiayaan, proses, dan pengelolaan yang dilaksanakan oleh segenap komponen dalam sistem pendidikan.

Sementara secara eksternal penelitian ini bisa membahas hal yang terkait dengan keberadaan unsur di luar sistem pendidikan internal untuk memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan mutu satuan pendidikan menuju satuan pendidikan berprestasi. Hal ini antara lain mencakup aspek pemberdayaan orang tua/wali murid, pemberdayaan

---

<sup>20</sup> D.EDM.MAMNU2018.hal 25.24/10/18.09.00-12.00

<sup>21</sup> O.W.MAMNU.07/07/18.09.00-15.00



masyarakat, dan kerja sama lintas sektoral baik dengan lembaga pemerintah maupun di luar pemerintah.

Strategi peningkatan mutu pada satuan pendidikan mencakup banyak komponen. Fokus pembahasan dalam penelitian ini diarahkan pada strategi peningkatan mutu kurikulum dan strategi peningkatan mutu guru. Kurikulum secara umum dipahami sebagai seperangkat materi pelajaran dan program kegiatan kependidikan yang diberikan oleh satuan pendidikan kepada siswa dalam satu periode pembelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Sementara guru secara umum dipahami sebagai tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu untuk menyampaikan proses belajar dan mendidik kepada peserta didik pada jenjang pendidikan dan jalur pendidikan tertentu sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan.

Tema ini menarik dibahas karena proses pendidikan dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan senantiasa terbuka untuk ditingkatkan mutunya. Di sisi lain, faktor kurikulum dan guru merupakan dua aspek utama yang bersifat dinamis dan melibatkan banyak komponen lain yang terkait dalam menentukan nilai kualitas tidaknya sebuah proses pendidikan pada jenjang dan jalur pendidikan tertentu.

Penelitian dilaksanakan di dua lokasi penelitian, yakni di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Blitar dan MA "Ma'arif" NU Kota Blitar dan MAN Blitar yang merupakan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal jenjang menengah atas berciri khas Islam yang diselenggarakan pemerintah, Madrasah Aliyah (MA) "Ma'arif" NU Kota Blitar merupakan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal jenjang menengah atas berciri khas Islam yang diselenggarakan masyarakat. Rumusan pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah strategi peningkatan mutu kurikulum di MAN Kota Blitar dan MA "Ma'arif" NU Kota Blitar?
2. Bagaimanakah strategi peningkatan mutu guru di MAN Kota Blitar dan MA "Ma'arif" NU Kota Blitar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menjelaskan strategi peningkatan mutu kurikulum di MAN Kota Blitar dan MA "Ma'arif" NU Kota Blitar.



2. Menjelaskan strategi peningkatan mutu guru di MAN Kota Blitar dan MA "Ma'arif" NU Kota Blitar.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Bagian ini akan membahas tentang batasan yang diberikan peneliti pada penelitian berjudul 'Memaksimalkan Ruang Digital Sebagai Media Disseminasi Potensi Desa di Kabupaten Tulungagung Selama Tahun 2018'. Batasan ini dilakukan untuk menjaga fokus pada penelitian ini. Batasan penelitian dibagi menjadi beberapa bagian agar lebih spesifik. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Secara umum, penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis  
Hasil temuan dari penelitian ini berpeluang untuk mendukung dan memperkuat teori terkait strategi peningkatan mutu kurikulum dan guru. Selain itu penelitian ini juga dapat menyempurnakan teori atau membangun teori baru yang berbeda dengan teori sebelumnya terkait dengan tema penelitian ini. Penelitian ini juga dimanfaatkan sebagai alternatif model pengembangan terkait peningkatan mutu pada satuan pendidikan.
2. Secara praktis  
Temuan dari penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk memberikan masukan khususnya kepada MAN Kota Blitar dan MA "Ma'arif" NU Kota Blitar, serta satuan pendidikan lain pada umumnya agar termotivasi dan memiliki berbagai alternatif upaya meningkatkan prestasi melalui peningkatan mutu kurikulum dan peningkatan mutu guru.

#### **E. Penegasan Istilah**

Pengertian dari berbagai macam istilah yang dipergunakan dalam konteks penelitian ini dapat ditegaskan sebagaimana penjelasan berikut.

1. Mutu guru  
Kesesuaian standar atau kriteria seorang guru berdasarkan kompetensi dan kualifikasinya dalam rangka melaksanakan tugas kependidikan. Bentuk berupa pemenuhan standar proses pembelajaran mulai dari merencanakan program kegiatan, melaksanakan program kegiatan, menilai program dan pelaksanaannya, dan menindaklanjuti hasil penilaian sesuai dengan regulasi yang berlaku



2. Mutu kurikulum  
Kesesuaian perangkat dan materi belajar yang disusun oleh guru untuk diterapkan dalam proses pembelajaran yang meliputi penetapan tujuan, materi, metode, dan strategi pembelajaran yang digunakan untuk mengoptimalkan potensi belajar siswa melalui penciptaan suasana belajar yang kondusif agar tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tercapaian.
3. Strategi peningkatan mutu kurikulum  
Rencana kegiatan yang tersistem, terpadu, dan berkelanjutan yang mencakup pengembangan materi pendidikan, metode, sarana prasarana, dan media untuk meningkatkan kualitas layanan satuan pendidikan sehingga mampu mengembangkan situasi yang memungkinkan siswa belajar dan mengembangkan potensinya secara optimal dalam bentuk pengembangan kualitas proses pembelajaran dan proses pendidikan pada umumnya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Strategi peningkatan mutu guru  
Seperangkat rencana kegiatan terkait pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi guru berdasarkan pendekatan yang sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan taraf layanan satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dalam proses belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
5. Satuan pendidikan berprestasi  
Lembaga pendidikan madrasah pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat dan dikelola dengan orientasi mutu dengan menerapkan kriteria di atas standar yang ditetapkan sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat belajar dan memiliki capaian prestasi di atas rata-rata satuan pendidikan yang lain, kriterianya adalah pencapaian standar pendidikan secara nasional karena adanya dukungan dari bidang kurikulum, guru, dan segenap komponen terkait lainnya, sehingga menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat

Dengan demikian, Penegasan istilah judul *Strategi Peningkatan Mutu pada Satuan Pendidikan Berprestasi Ditinjau dari Kurikulum dan Guru: Studi Multikasus pada Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar dan Madrasah Aliyah "Ma'arif" Nahdlatul Ulama Kota Blitar* adalah rencana kegiatan yang tersistem, terpadu, dan berkelanjutan yang mencakup



pengembangan mutu dalam bidang kurikulum dan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah (MAN Kota Blitar) dan yang diselenggarakan masyarakat (MA "Ma'arif" NU Kota Blitar).

Peningkatan mutu dalam bidang kurikulum mencakup materi pendidikan, metode, sarana prasarana, dan media. Pengembangan mutu guru dimaknai sebagai rencana kegiatan terkait pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi guru; untuk meningkatkan kualitas layanan satuan pendidikan yang lebih baik sehingga mampu mengembangkan kondisi yang memungkinkan siswa belajar secara optimal. Hal tersebut bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa dalam bentuk pengembangan kualitas proses pendidikan dan pembelajaran dalam upaya mencapai tujuan pendidikan pada satuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.